



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH**

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Tahun 2025 Dinas Perdagangan Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kepala Dinas/Pengguna Anggaran berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati selaku Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini adalah Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, disamping itu Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Entitas Akuntansi berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan APBD dengan Penyusunan Laporan Keuangan.

Penyusunan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan APBD Tahun 2025 mengacu kepada Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari :

- Laporan Realisasi Keuangan
- Neraca
- Catatan Atas Laporan Keuangan
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas

Serta dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Dinas Perdagangan Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota atas pelaksanaan APBD.

Penyusunan Laporan Keuangan khususnya neraca telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Meskipun belum sempurna, informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Dinas Perdagangan Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 masih belum sempurna, untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai proses pembelajaran (*learning psocess*) demi penyempurnaan Laporan Keuangan di masa yang akan datang.

Sarilamak, 30 Januari 2026

Mengetahui,

PENGGUNA ANGGARAN



Endra Amzar, S.H

NIP. 19680906 199603 1 001

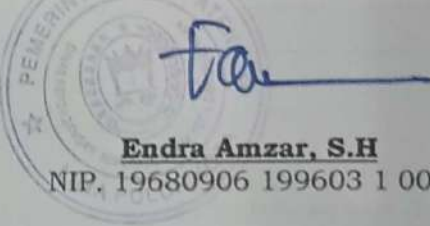
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari (a). Laporan Realisasi Anggaran, (b). Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan-catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sarilamak, 30 Januari 2026

**KEPALA DINAS
PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Endra Amzar, S.H
NIP. 19680906 199603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

DAFTAR ISI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

NERACA

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Data Umum SKPD.....	1
1.2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang Dinas Perdagangan Koperasi, UKM	1
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.4. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.5. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.6. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	3

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro.....	6
2.2. Kebijakan Keuangan	6
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	7

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	10
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian Target yang telah dicapai	11

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi	12
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	12
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	13
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.....	17

BAB V PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja.....	20
5.2. Neraca.....	23
5.3. Laporan Operasional	28
5.4. Laporan Perubahan Ekuitas	31

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Struktur Organisasi	33
6.2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan	34

BAB VII PENUTUP

7.1. Kesimpulan.....	35
7.2. Saran.....	35

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN A	: Struktur Organisasi Dinas Peragangan Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota
LAMPIRAN B	: Bukti Setoran Sisa Belanja (UYHD)
LAMPIRAN C	: Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran Pajak Tahun Anggaran 2025
LAMPIRAN D	: Register SP2D Tahun Anggaran 2025
LAMPIRAN E	: Rekening Koran Dana Bergulir Dinas Peragangan Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025
LAMPIRAN F	: Rekapitulasi Persediaan Barang per 31 Desember 2025
LAMPIRAN G	: Rekapitulasi Buku Inventaris per 31 Desember 2025
LAMPIRAN H	: Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025
LAMPIRAN I	: Penyusutan Kartu Inventaris Barang C, D dan E Tahun 2025
LAMPIRAN J	: Kartu Inventaris Barang A s/d F dan Aset Lainnya Tahun 2025
LAMPIRAN K	: Berita Acara Opname Cash dan Stock opname per 31 Desember 2025
LAMPIRAN L	: SPJ-Belanja Fungsional per 31 Desember 2025
LAMPIRAN M	: Laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan
LAMPIRAN N	: Laporan Piutang Retribusi Pelataran Pasar Dangung-Dangung, SKRD dan STS

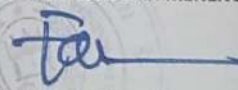


PEMERINTAHAN KAB. LIMA PULUH KOTA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	60.000.000,00	76.732.000,00	127,88	7.455.100,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.000.000,00	76.732.000,00	127,88	7.455.100,00
4.1.02	Retribusi Daerah	60.000.000,00	76.732.000,00	127,88	7.455.100,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	60.000.000,00	76.732.000,00	127,88	7.455.100,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	60.000.000,00	76.732.000,00	127,88	7.455.100,00
5	BELANJA DAERAH	5.023.233.195,00	4.901.533.728,00	97,57	4.708.663.929,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.020.033.195,00	4.898.333.728,00	97,57	4.694.123.729,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.351.326.695,00	4.243.950.429,00	97,53	3.991.808.039,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	668.706.500,00	654.383.299,00	97,85	702.315.690,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	5.020.033.195,00	4.898.333.728,00	97,57	4.694.123.729,00
5.2	BELANJA MODAL	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	14.540.200,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	14.540.200,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	14.540.200,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	14.540.200,00
	JUMLAH BELANJA	5.023.233.195,00	4.901.533.728,00	97,57	4.708.663.929,00
	SURPLUS/DEFISIT	(4.963.233.195,00)	(4.824.801.728,00)	97,21	(4.701.208.829,00)

Kab. Lima Puluh Kota, 5 Februari 2026
KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

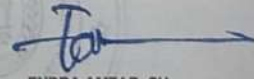

ENDRA AMZAR, SH
NIP.196809061996031001

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NERACA
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No. Akun	Uraian	2025	2024
1.	ASET		
1.1.	ASET LANCAR	283.740.474,00	242.459.174,00
1.1.01.	Kas dan Setara Kas	239.285.124,00	239.285.124,00
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan		-
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran		-
1.1.01.04	Kas di BLUD		
1.1.01.05	Kas Dana BOS		
1.1.01.06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
1.1.01.07	Kas Lainnya	239.285.124,00	239.285.124,00
1.1.03.	Piutang Pajak Daerah		
1.1.04.	Piutang Retribusi	35.570.000,00	-
1.1.04.01	Piutang Retribusi Kios	35.570.000,00	-
1.1.05.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.05.03	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta		
1.1.06.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.06.06	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	48.620.538,76	48.620.538,76
1.1.06.07	Piutang Pendapatan Bunga		
1.1.06.16	Piutang Pendapatan BLUD		
1.1.06.18	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada		
1.1.06.19	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
1.1.07.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
1.1.07.01	Piutang Dana Perimbangan		
1.1.08.	Piutang Transfer Antar Daerah		
1.1.08.01	Piutang Bagi Hasil		
1.1.09.	Piutang Lainnya		
1.1.10.	Penyisihan Piutang		
1.1.10.01.	Penyisihan Piutang Pendapatan		
1.1.10.01.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
1.1.10.01.	Penyisihan Piutang Retribusi		
1.1.10.01.	Penyisihan Piut. Hasil Pengel. Kekyn Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.10.02	Penyisihan Bagian Lancar tagihan jangka panjang - Dana Bergulir	-48.620.538,76	-48.620.538,76
1.1.12.	Persediaan	8.885.350,00	3.174.050,00
	Jumlah Aset Lancar	283.740.474,00	242.459.174,00
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.01.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.01.05	Dana Bergulir	110.060.190,00	110.060.190,00
1.1.10.02	Penyisihan Pokok Dana Bergulir	-110.060.190,00	-110.060.190,00
	Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.02.	Investasi Jangka Panjang Permanen		
1.2.02.01.	Penyertaan Modal		
	Jumlah Investasi Jk.Panjang Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
1.3.	ASET TETAP	24.680.247.847,00	24.677.047.847,00
1.3.01.	Tanah	240.954.000,00	240.954.000,00
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	4.922.466.881,00	4.919.266.881,00
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	19.290.497.278,00	19.290.497.278,00
1.3.04.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	93.185.700,00	93.185.700,00
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	73.813.500,00	73.813.500,00
1.3.06.	Konstruksi dalam Pengerjaan	59.330.488,00	59.330.488,00
	- Gedung		
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-8.885.936.918,00	-8.404.762.299,00
1.3.07.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-4.912.796.781,00	-4.802.113.121,00
1.3.07.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-3.901.714.067,00	-3.539.283.375,00
1.3.07.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-56.076.070,00	-48.015.803,00
1.3.07.04.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-15.350.000,00	-15.350.000,00
	Jumlah Aset Tetap	15.794.310.929,00	16.272.285.548,00

No. Akun	Uraian	2025	2024
1.5.	ASET LAINNYA	-	-
1.5.03.	Aset Tidak Berwujud	-	-
1.5.03.01.	Aset Tidak Berwujud	-	-
1.5.03.01	Software		
1.5.04.	Aset Lain-lain	17.300.000,00	17.300.000,00
1.5.04.01.	Aset lain-lain	17.300.000,00	17.300.000,00
1.5.04.01.	Aset Rusak Berat/Usang	17.300.000,00	17.300.000,00
1.5.04.01.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		
1.5.05.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
1.5.06.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-17.300.000,00	-17.300.000,00
1.5.06.01.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-17.300.000,00	-17.300.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	-	-
	JUMLAH ASET	16.078.051.403,00	16.514.744.722,00
2.	KEWAJIBAN	-	-
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-
2.1.01.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		
2.1.05.	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
2.1.06.	Utang Belanja	-	-
2.1.06.02.	Utang Belanja Barang dan Jasa	-	-
2.1.06.02.	Utang Belanja Jasa	-	-
2.1.06.02.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon		
2.1.06.02.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		
2.1.06.02.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		
2.1.06.02.	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		
2.1.06.02.	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		
2.1.06.02.	Utang Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural		-
2.1.06.02.	Utang Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung		-
2.1.06.02.	Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		-
2.1.06.05	Utang Belanja Hibah		-
2.1.06.05.	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		-
2.1.07.	Utang Jangka Pendek Lainnya		-
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-
3.	EKUITAS		
3.1.	EKUITAS		
3.1.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.	Ekuitas	16.078.051.403,00	16.514.744.722,00
3.1.01.01.	Ekuitas		
	JUMLAH EKUITAS	16.078.051.403,00	16.514.744.722,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	16.078.051.403,00	16.514.744.722,00

Sariilamak, Januari 2026
 KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
 USAHA KECIL DAN MENENGAH
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


 ENDRA AMZAR, SH
 NIP. 196809061996031001



PEMERINTAHAN KAB. LIMA PULUH KOTA

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NERACA

TAHUN ANGGARAN 2025

1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

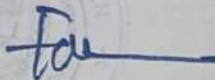


(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	16.078.051.403,00	16.514.744.722,00
1.1	ASET LANCAR	283.740.474,00	242.459.174,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	239.285.124,00	239.285.124,00
1.1.01.07	Kas Lainnya	239.285.124,00	239.285.124,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	35.570.000,00	0,00
1.1.04.01	Piutang Retribusi Jasa Umum	35.570.000,00	0,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	48.620.538,76	48.620.538,76
1.1.06.06	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	48.620.538,76	48.620.538,76
1.1.10	Penyisihan Piutang	(48.620.538,76)	(48.620.538,76)
1.1.10.02	Penyisihan Piutang Lainnya	(48.620.538,76)	(48.620.538,76)
1.1.12	Persediaan	8.885.350,00	3.174.050,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	8.885.350,00	3.174.050,00
	JUMLAH ASET LANCAR	283.740.474,00	242.459.174,00
1.3	ASET TETAP	15.794.310.929,00	16.272.285.548,00
1.3.01	Tanah	240.954.000,00	240.954.000,00
1.3.01.01	Tanah	240.954.000,00	240.954.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	4.922.466.881,00	4.919.266.881,00
1.3.02.01	Alat Besar	655.000,00	655.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.800.586.125,00	1.800.586.125,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	519.156.000,00	519.156.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.434.950.386,00	1.434.950.386,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	259.803.370,00	259.803.370,00
1.3.02.10	Komputer	907.316.000,00	904.116.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	19.290.497.278,00	19.290.497.278,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	19.290.497.278,00	19.290.497.278,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	93.185.700,00	93.185.700,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	75.500.000,00	75.500.000,00
1.3.04.03	Instalasi	5.175.000,00	5.175.000,00
1.3.04.04	Jaringan	12.510.700,00	12.510.700,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	73.813.500,00	73.813.500,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	159.500,00	159.500,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	58.350.000,00	58.350.000,00
1.3.05.06	Barang Koleksi Non Budaya	15.304.000,00	15.304.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	59.330.488,00	59.330.488,00
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	59.330.488,00	59.330.488,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(8.885.936.918,00)	(8.404.762.299,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.912.796.781,00)	(4.802.113.121,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.901.714.067,00)	(3.539.283.375,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(56.076.070,00)	(48.015.803,00)
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(15.350.000,00)	(15.350.000,00)
	JUMLAH ASET TETAP	15.794.310.929,00	16.272.285.548,00
1.5.04	Aset Lain-lain	17.300.000,00	17.300.000,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	17.300.000,00	17.300.000,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(17.300.000,00)	(17.300.000,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(17.300.000,00)	(17.300.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	16.078.051.403,00	16.514.744.722,00

	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3	EKUITAS	16.078.051.403,00	16.514.744.722,00
3.1	EKUITAS	16.078.051.403,00	16.514.744.722,00
3.1.01	Ekuitas	11.253.249.675,00	11.813.535.893,00
3.1.01.01	Ekuitas	16.514.744.722,00	17.403.008.977,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(5.261.495.047,00)	(5.589.473.084,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	4.824.801.728,00	4.701.208.829,00
3.1.03.01	RK PPKD	4.824.801.728,00	4.701.208.829,00
	JUMLAH EKUITAS	16.078.051.403,00	16.514.744.722,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	16.078.051.403,00	16.514.744.722,00

Kab. Lima Puluh Kota, 29 April 2026
KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH


ENDRA AMZAR, SH
NIP.196809061996031001



PEMERINTAHAN KAB. LIMA PULUH KOTA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	112.302.000,00	7.455.100,00	104.846.900,00	1.406,38
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	112.302.000,00	7.455.100,00	104.846.900,00	1.406,38
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	112.302.000,00	7.455.100,00	104.846.900,00	1.406,38
7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum-LO	112.302.000,00	7.455.100,00	104.846.900,00	1.406,38
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	112.302.000,00	7.455.100,00	104.846.900,00	1.406,38
	JUMLAH PENDAPATAN	112.302.000,00	7.455.100,00	104.846.900,00	1.406,38
8	BEBAN	5.373.797.047,00	5.596.928.184,00	(223.131.137,00)	(3,99)
8.1	BEBAN OPERASI	4.892.622.428,00	5.091.273.515,00	(198.651.087,00)	(3,90)
8.1.01	Beban Pegawai	4.243.950.429,00	3.991.808.039,00	252.142.390,00	6,32
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.936.558.570,00	2.709.315.425,00	227.243.145,00	8,39
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.307.391.859,00	1.259.832.614,00	47.559.245,00	3,78
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	22.660.000,00	(22.660.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	648.671.999,00	1.099.465.476,00	(450.793.477,00)	(41,00)
8.1.02.01	Beban Barang	123.186.162,00	468.991.054,00	(345.804.892,00)	(73,73)
8.1.02.02	Beban Jasa	360.424.661,00	430.187.122,00	(69.762.461,00)	(16,22)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	101.064.510,00	98.709.850,00	2.354.660,00	2,39
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	63.996.666,00	101.577.450,00	(37.580.784,00)	(37,00)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	4.892.622.428,00	5.091.273.515,00	(198.651.087,00)	(3,90)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	481.174.619,00	505.654.669,00	(24.480.050,00)	(4,84)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	110.683.660,00	135.163.710,00	(24.480.050,00)	(18,11)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	362.430.692,00	362.430.691,00	1,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.060.267,00	8.060.268,00	(1,00)	(0,00)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	481.174.619,00	505.654.669,00	(24.480.050,00)	(4,84)
	JUMLAH BEBAN	5.373.797.047,00	5.596.928.184,00	(223.131.137,00)	(3,99)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.261.495.047,00)	(5.589.473.084,00)	327.978.037,00	(5,87)

Kab. Lima Puluh Kota, 29 April 2026
KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH


ENDRA AMZAR, SH
NIP.196809061996031001



PEMERINTAH KAB. LIMA PULUH KOTA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	16.514.744.722,00	17.309.495.663,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(5.261.495.047,00)	(5.589.473.084,00)
RK PPKD	4.824.801.728,00	4.701.208.829,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	93.513.314,00
EKUITAS AKHIR	16.078.051.403,00	16.514.744.722,00

Kab. Lima Puluh Kota, 29 April 2026

KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH



Endra Amzar, SH

ENDRA AMZAR, SH
NIP.196809061996031001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Data Umum OPD

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan Sub Ordinat Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terbentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Tugas Pokok Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

- (1) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta tugas perbantuan.
- (2) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maka Dinas bekerja sama dengan lembaga terkait.

b. Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- (1) Perumusan kebijakan teknis dalam urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
- (3) Pembinaan dan pelaksanaan urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

c. Wewenang

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2025, sehingga diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di OPD. Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara Legislatif dan Eksekutif.

Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Laporan Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.4. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Di sisi lain, penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (*trace back*) pos-pos Laporan Keuangan.

1.5. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- (1) Undang-undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945 ;
- (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
- (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (8) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klarifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
- (9) Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
- (10) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 99 tahun 2021 tentang perubahan ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

1.6. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi :

I. Pendahuluan

1.1 Data Umum OPD ;

1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;

- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan ;
 - 1.4 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan ;
 - 1.5 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan ;
 - 1.6 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.1 Ekonomi Makro ;
 - 2.2 Kebijakan Keuangan ;
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan ;
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan ;
- IV. Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi ;
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan ;
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan ;
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
- V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja ;
 - 5.2 Neraca.
- VI. Penjelasan atas Informasi-informasi Non-Keuangan
- 6.1 Struktur Organisasi ;
 - 6.2 Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan.

VII. Penutup

7.1 Kesimpulan

7.2 Saran

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Sesuai dengan tugas pokok dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maka Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mampu menciptakan sistem Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diperlukan langkah-langkah :

- Melengkapi sarana dan prasarana perkoperasian, usaha mikro kecil dan menengah, dan sarana/prasarana pasar di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai kebutuhan secara bertahap.
- Meningkatkan sumber daya manusia di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.

Disamping tugas sebagaimana telah dijelaskan diatas yang pada prinsipnya pelaksanaan otonomi daerah di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota juga melaksanakan tugas dekonsentrasi sesuai dengan kedudukan Bupati selaku Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian diatas sangat jelas bahwa peran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perdagangan, perkoperasian, usaha kecil dan menengah mempunyai cakupan yang luas dalam melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan untuk menata sistem perdagangan, perkoperasian, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai kebutuhan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengelola DPA Tahun Anggaran 2025 meliputi hal berikut :

a. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang pendapatan untuk Tahun 2025 digariskan sebagai berikut :

- (1) Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah.
- (2) Peningkatan pendapatan dari Retribusi pelayanan pasar yaitu retribusi kios pada pasar dangung- dangung.

b. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- (2) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- (3) Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat hasil pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian DPA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 8 Program dan 12 Kegiatan yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA.

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.377.726.695	4.266.900.429	97,47%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.686.100	62.640.766	99,93%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.726.000	229.567.261	99,93%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.220.000	112.991.410	97,22%

2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.776.000	10.771.670	99,96%

3. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.2000.000	6.139.646	99,03%

4. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERSI

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	85.912.000	80.948.864	94,22%

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM).

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	46.000.000	45.999.400	100%

6. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	20.200.000	18.380.112	90,99%

7. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	19.959.000	19.927.000	99,84%
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	34.374.400	34.350.670	99,93%

8. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	13.456.000	12.916.500	95,99%

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan

Total Realisasi Pendapatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 76.732.000,-. Jumlah tersebut 127,89 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 60.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan	Anggaran	Realisasi	
	Rp.	Rp.	%
Pendapatan Retribusi Daerah	60.000.000,-	76.732.000,-	127,89%
Jumlah	60.000.000,-	76.732.000,-	127,89%

Jumlah diatas merupakan pendapatan dari retribusi jasa umum atas Pelayanan pasar Dangung – Dangung (Retribusi Kios) selama tahun 2025.

Pengelolaan pasar dangung-dangung berada di bawah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemungutan Retribusi Pasar dilaksanakan 2 kali dalam satu minggu setiap hari Rabu dan Hari Sabtu oleh tim Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibawah Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan.

Adapun Pencapaian Realisasi Pendapatan pada Tahun 2025 sangat memuaskan dan melebihi dari target yang diberikan sebanyak Rp. 76.732.000,- yaitu sebesar 127,89 %.

3.1.2. Belanja

Total Realisasi Belanja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 4.901.533.728,-. Jumlah tersebut mencapai 97,58% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 5.023.233.195,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp.	Rp.	%
Belanja Pegawai	4.351.326.695,-	4.243.950.429	97,53%
Belanja Barang dan Jasa	668.706.500,-	654.383.299	97,86%
Belanja Modal	3.200.000,-	3.200.000	100%
Jumlah	5.023.233.195,-	4.901.533.728	97,58%

Pada Belanja Pegawai dianggarkan Rp. 4.351.326.695,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.243.950.429,-, atau sebesar 97,53%.

Pada Belanja Barang dan Jasa, anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 668.706.500,- dan terealisasi Rp. 654.383.299,- atau sebesar 97,86%.

Pada Belanja Hibah, anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 0,- dan terealisasi Rp. 0,- atau sebesar 0 %.

Sedangkan untuk Belanja Modal di anggaran sebesar Rp. 3.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.200.000,- atau sebesar 100 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Pada tahun anggaran 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pencapaian realisasi pendapatan secara umum sudah berjalan dengan cukup baik yang dibuktikan dengan pencapaian realisasi melebihi target yang diberikan. Adapun hambatan dan kendala yang masih dihadapi ialah:

1. Belum ada data masing-masing pedagang termasuk luas los/pelataran yang digunakan sehingga sulit menentukan besaran retribusi sesuai dengan Perda No 2 tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Mengingat belum ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi, maka penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Belum disusunnya kebijakan akuntansi tersebut berkaitan dengan perlunya persiapan baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia.

4.1 Entitas Akuntansi

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diserahkan pada masing-masing OPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai salah satu OPD di lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan melalui Badan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah basis akuntansi akrual.

- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pendapatan-LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian Aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1) Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2) Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

3) Investasi Jangka Pendek

Investasi dalam bentuk surat berharga :

- o Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- o Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

4) Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengakutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

5) Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka

digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana Bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

6) Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

7) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

8) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

9) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan , irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

10) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

11) Kontruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai KDP tersebut meliputi :

- (1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- (2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh OPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan atas azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat :

Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

BAB V
PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)
1	PENDAPATAN DEERAH		
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	76.732.000	7.455.100
a.	Pendapatan Retribusi Daerah	76.732.000	7.455.100
	Jumlah tersebut merupakan realisasi dari anggaran pendapatan dalam Tahun Anggaran 2024 dimana pendapatan tersebut diperoleh dari retribusi pelayanan pasar yaitu retribusi kios di Kabupaten Lima Puluh Kota		
	Jumlah	76.732.000	7.455.100
2	BELANJA DAERAH	4.901.533.728	4.708.663.929
2.1	Belanja Operasi		
2.1.01	Belanja Pegawai	4.243.950.429	3.991.808.039
	Jumlah tersebut merupakan realisasi dari anggaran belanja pegawai dalam tahun anggaran 2025. jumlah relisasi dan anggaran belanja pegawai tersebut terinci atas :		
	- Gaji dan tunjangan	2.936.558.570	2.709.315.425
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	1.304.391.859	1.259.832.614
	- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,-	0,-
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	22.660.000
	Jumlah	4.243.950.429	3.991.808.039
2.1.02	Belanja barang dan jasa	654.383.299	702.315.690
	Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun anggaran 2025 dan 2024, dimana realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025 mencapai 89,84 % dari anggaran Rp. 668.706.500,- terealisasi sebesar Rp. 654.383.299,- dari yang ditetapkan.		
	Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :		
	- Belanja barang pakai habis	128.897.462	71.841.268
	- Belanja bahan - bahan bakar dan pelumas	33.535.472,00	14.242.000
	- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	19.318.000,00	375.000
	- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor	40.825.500,00	26.922.500
	- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak	21.868.490,00	14.189.692
	- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - benda pos	700.000,00	1.080.000
	- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat listrik	-	1.003.000
	- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - perlengkapan dinas	-	-
	- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	0,00	2.591.576
	- Belanja makan dan minum rapat	8.510.000,00	4.187.500
	- Belanja makan dan minum jamuan tamu	1.740.000,00	5.150.000
	- Belanja makan dan minum Aktivitas Lapangan	2.400.000,00	2.100.000
	- Belanja jasa kantor	304.521.200	343.690.782
	- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator,Pembawa Acara, dan Panitia	-	17.225.000
	- Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	-	60.000.000
	- Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	-	-
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	187.000.000	139.000.000
	- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	-	12.000.000
	- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	-	39.000.000
	- Belanja Jasa Kalibrasi	-	-
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	-	-
	- Belanja tagihan telepon	-	-
	- Belanja tagihan air	333.800	401.375
	- Belanja tagihan listrik	82.250.000	68.997.307

- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	6.681.100
- Belanja Paket/Pengiriman	60.500	386.000
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.926.900	-
- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	22.950.000	-
- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.483.461	680.400
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.483.461	680.400
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	-
- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	-
- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.700.000	2.200.000
- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Berpenumpang	1.200.000	-
- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	1.000.000
- Belanja Sewa Alat Pengolahan Lainnya	-	-
- Belanja Sewa Peralatan Umum	1.500.000	-
- Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	1.200.000
- Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-
- Belanja Sewa Alat Musik	-	-
- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	-	-
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	-	-
- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	-	-
- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	50.720.000	83.615.940
- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	-	80.015.940
- Belanja Sosialisasi	-	3.600.000
- Belanja Bimbingan Teknis	50.720.000	-
- Belanja Pemeliharaan	101.064.510	98.709.850
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terdiri dari :		
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	68.199.510	61.379.950
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.400.000	20.789.900
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	4.320.000	-
Belanja Bahan Bakar/Minyak Pelumas	-	-
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-	-
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.045.000	3.660.000
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.030.000	8.760.000
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.070.000	-
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	-	4.120.000
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terdiri dari :		
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-
- Belanja Perjalanan Dinas	63.996.666	101.577.450
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.361.666	73.532.450
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.635.000	28.045.000

- Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-
- Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	-	-
JUMLAH	654.383.299	702.315.690
2.1.05 BELANJA HIBAH		
- Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-
Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	-
Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang terdiri dari :		
Belanja Pembangunan/Revitalisasi Pasar Nagari Durian Tinggi	-	-
Belanja Pembangunan/Revitalisasi Pasar Nagari Lubuak Alai	-	-
Belanja Pembangunan/Revitalisasi Pasar Piladang	-	-
Belanja Pembangunan/Revitalisasi Pasar Alang Laweh	-	-
Belanja Pembangunan/Revitalisasi Pasar Taratak Nagari Kubang	-	-
Belanja Lanjutan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Nagari Lubuak Alai	-	-
Belanja Barang Hibah Kelompok Maju Bersama	-	-
Belanja Pembangunan/Revitalisasi Pasar Nagari Galugua	-	-
Belanja Pembangunan/Revitalisasi Pasar Nagari Sarilamak	-	-
Belanja Hibah Barang Kepada POKLAHSAR CLARISA	-	-
2.1.06 - BELANJA BANTUAN SOSIAL	-	-
Belanja Bantuan sosial Barang yang diserahkan kepada Masyarakat	-	-
JUMLAH BEBAN BELANJA	4.898.333.728	4.694.123.729
2,2 BELANJA MODAL	3.200.000	14.540.200
2.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.200.000	14.540.200
- Belanja Modal Personal Computer		10.190.200
- Belanja Modal Peralatan Personal Computer		850.000
- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.200.000,00	3.500.000
2.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-
- Lanjutan Pembangunan Gedung (System Resy Gudang) SRG II	-	-
- Pembangunan pasar danguang - danguang	-	-
5.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
- Belanja Modal jaringan LAN	-	-
- Belanja Modal perbaikan jaringan telpon	-	-
- Instalasi air	-	-
JUMLAH BELANJA MODAL	3.200.000	14.540.200
JUMLAH TOTAL BELANJA	4.901.533.728	4.708.663.929

Uraian		Realisasi 2025 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)
ASET			
a. Aset lancar		283.740.474,00	242.459.174,00
1. Kas dan setara kas		239.285.124,00	239.285.124,00
Kas lainnya		239.285.124,00	239.285.124,00
Terdapat Saldo awal pada Rekening Dana Bergulir		239.285.124,00	
Tahun 2025 Masuk Bunga sebesar		1.799.258,00	
Keluar ke rekening Penerimaan Pemda 50 Kota		1.799.258,00	
Jumlah Saldo Dana bergulir tanggal 31 Desember 2025		239.285.124,00	
2. Kas dibendahara pengeluaran		0	0
3. Piutang Retribusi		35.570.000	-
Piutang retribusi Kios		35.570.000	
Berdasarkan SKRD yang sudah dibuat terdapat kekurangan penyetoran retribusi sebesar :			
Jenis Pelataran	Tarif Retribusi (SKRD)	Setor (STS)	Piutang
1. Pelataran Depan	11.445.000	8.675.000	2.770.000
2. pelataran terbangun	42.800.000	14.000.000	28.800.000
3. Pelataran Parkir	12.000.000	8.000.000	4.000.000
Jumlah Piutang Retribusi Kios			35.570.000
4. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		48.620.538,76	48.620.538,76
Jumlah tersebut merupakan tunggakan bunga dan denda dana bergulir APBD Kabupaten per 31 Des 2024 dan 31 Des 2025			
5. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi		(48.620.538,76)	(48.620.538,76)
Jumlah tersebut merupakan penyisihan bunga dan denda dana bergulir APBD Kabupaten per 31 Des 2024 dan 31 Des 2025 dengan rincian sebagai berikut :			
Penyisihan bunga		(39.264.470,00)	
Penyisihan denda		(9.356.068,76)	
Jumlah		(48.620.538,76)	
7. Persediaan		8.885.350,00	3.174.050,00
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025.			
Saldo persediaan 31 Desember 2025 senilai Rp. 8.885.350,- yang terdiri dari :			
ATK		3.141.350	
Bahan-Bahan Lainnya		160.000,00	
Dari pembangunan/rehab pasar		5.584.000,00	
jumlah		8.885.350,00	
sedangkan saldo persediaan pada tahun 2024 senilai Rp. 3.174.050,- dengan rincian :			
ATK		3.174.050	
Barang percontohan		-	
Dari pembangunan/rehab pasar		-	
Jumlah		3.174.050	
b. Investasi jangka panjang		-	-
1. Dana Bergulir Kepada Koperasi		110.060.190,00	110.060.190,00
Jumlah tersebut merupakan investasi non permanen yang dilakukan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan 31 des 2024 dan 31 des 2025 dengan hitungan nilai investasi bersih dan penyisihannya terlampir, uraian investasi sebagai berikut :			
i. Dana Bergulir APBD 2003 sebanyak Rp. 106.000.000,00 untuk 3 (tiga) Koperasi sebagai berikut :			
Nama Koperasi / PKM	Jumlah Pinjaman	Angsuran Pokok	Tunggakan
• KUD Taram	53.000.000	28.668.000	24.332.000
• KUD Semangat Baru	26.500.000	26.500.000	-
• KOPINKRA BERKAH	26.500.000	7.361.110	19.138.890
Jumlah	106.000.000	62.529.110	43.470.890

- ii. Dana Bergulir APBD tahun 2004 sebanyak Rp. 150.000.000,00 untuk 3 (tiga) koperasi dan 5 (Lima) Pengusaha Kecil:

Nama Koperasi / PKM	Jumlah Pinjaman	Angsuran Pokok	Tunggakan
- KSU Balai Talang	40.000.000	14.346.150	25.653.850
- KSP Bina Alfalah	40.000.000	28.335.900	11.664.100
- KSU PKK koto Tinggi	40.000.000	40.000.000	-
- PK Beringin Project	6.000.000	6.000.000	-
- PK Patoga Keramik	6.000.000	6.000.000	-
- PK Bordir Mutiara	6.000.000	6.000.000	-
- PK Empat Bersaudara	6.000.000	1.636.650	4.363.350
- PK Karya Berkah	6.000.000	3.650.000	2.350.000
Jumlah	150.000.000	105.968.700	44.031.300

- iii. Dari penerimaan angsuran pokok dana tersebut diatas tahun 2003 dan 2004 digulirkan kembali pada tahun 2006 sebesar Rp. 75.000.000,00 untuk 15 Pengusaha Kecil.

Dengan rincian sebagai berikut:

Nama Koperasi / PKM	Jumlah Pinjaman	Angsuran Pokok	Tunggakan
- PK Mutia.	5.000.000	5.000.000	-
- PK. Sintani Makmur.	5.000.000	5.000.000	-
- PK. Star Motor Sport	5.000.000	5.000.000	-
- PK. Putra Bungsu.	5.000.000	5.000.000	-
- PK. Faizah Collection.	5.000.000	456.000	4.544.000
- PK. Ikhtia.	5.000.000	1.216.000	3.784.000
- PK. Ladies Konveksi	5.000.000	3.192.000	1.808.000
- PK. Bunga Tanjung.	5.000.000	5.000.000	-
- PK. Remantha	5.000.000	5.168.000	-
- PK. Go Defa	5.000.000	5.000.000	-
- PK. Cipta.	5.000.000	5.000.000	-
- PK. Evi.	5.000.000	300.000	4.700.000
- PK. Karya Bersama	5.000.000	5.000.000	-
- PK. Mitra Karya Sejati	5.000.000	1.520.000	3.480.000
- PK. Mukmin Tailor.	5.000.000	590.000	4.410.000
Jumlah	75.000.000	52.442.000	22.726.000

Dari Dana yang di gulirkan tahun 2006 terdapat satu Pengusaha Kecil Menengah yang terlebih melakukan setoran Pokok sebesar Rp. 168.000,- yaitu PK Renantha

Nama Koperasi / PKM	Jumlah Pinjaman	Angsuran Pokok	Tunggakan
Jumlah Dana Bergulir	331.000.000	220.939.810	110.228.190
Kelebihan Setor PK Renantha	5.000.000	5.168.000	168.000
Jumlah Tunggakan			110.060.190

2. Penyisihan Pokok Dana Bergulir

(110.060.190,00) (110.060.190,00)

Terdapat dana bergulir yang macet melebihi 10 tahun dengan rincian sebagai berikut :

- i. Tahun 2003 2 (dua) Koperasi sebesar Rp.0,- yaitu:

- KUD Taram	
Tunggakan Pokok	24.332.000,00
Penyisihan Tunggakan Pokok	24.332.000,00
Sisa Tunggakan Pokok setelah penyisihan	-
• KOPINKRA BERKAH	
Tunggakan Pokok	19.138.890,00
Penyisihan Tunggakan Pokok	19.138.890,00
Sisa Tunggakan Pokok setelah penyisihan	-

- ii. Tahun 2004 2 (dua) Koperasi dan 2 (dua) Pengusaha Kecil yaitu :

• KSU Balai Talang Rp. 0,-	
Tunggakan Pokok	25.653.850,00
Penyisihan Tunggakan Pokok	25.653.850,00
Sisa Tunggakan Pokok setelah penyisihan	-
• KSP Bina Al' Falah Rp. 0,-	
Tunggakan Pokok	11.664.100,00
Penyisihan Tunggakan Pokok	11.664.100,00
Sisa Tunggakan Pokok setelah penyisihan	-

• Pengusaha Kecil Empat Saudara Rp. 0,-	
Tunggakan Pokok	4.363.350,00
Penyisihan Tunggakan Pokok	4.363.350,00
Sisa Tunggakan Pokok setelah penyisihan	-

• Pengusaha Kecil Karya Berkah Rp. 0,-	
Tunggakan Pokok	2.350.000,00
Penyisihan Tunggakan Pokok	2.350.000,00
Sisa Tunggakan Pokok setelah penyisihan	-

iii.

Perguliran kembali Tahun 2006 yang macet sebanyak 6 (enam) Pengusaha Kecil

• Pengusaha Kecil Faizah Collection	
Tunggakan Pokok	4.544.000,00
Penyisihan Tunggakan Pokok	4.544.000,00
Sisa Tunggakan Pokok setelah penyisihan	-

• Pengusaha Kecil IKHTIA	
Tunggakan Pokok	3.784.000,00
Penyisihan Tunggakan Pokok	3.784.000,00
Sisa Tunggakan Pokok setelah penyisihan	-

• Pengusaha Kecil Ladies Konveksi	
Tunggakan Pokok	1.808.000,00
Penyisihan Tunggakan Pokok	1.808.000,00
Sisa Tunggakan Pokok setelah penyisihan	-

• Pengusaha Kecil Evi	
Tunggakan Pokok	4.700.000,00
Penyisihan Tunggakan Pokok	4.700.000,00
Sisa Tunggakan Pokok setelah penyisihan	-

• Pengusaha Kecil Mitra Karya Sejati	
Tunggakan Pokok	3.480.000
Penyisihan Tunggakan Pokok	3.480.000
Sisa Tunggakan Pokok setelah penyisihan	-

• Pengusaha Kecil Mukmin Tailor	
Tunggakan Pokok	4.410.000
Penyisihan Tunggakan Pokok	4.410.000
Sisa Tunggakan Pokok setelah penyisihan	-

Dan keterangan diatas sebagai berikut :

Tunggakan Pokok	110.228.190,00
Penyisihan Tunggakan Pokok	110.228.190,00
Sisa Tunggakan Pokok setelah penyisihan	-

Tunggakan Bunga	39.264.470,00
Penyisihan Tunggakan Bunga	39.264.470,00
Sisa Tunggakan Bunga setelah penyisihan	-

Tunggakan Denda	9.356.068,76
Penyisihan Tunggakan Denda	9.356.068,76
Sisa Tunggakan Denda setelah penyisihan	-

Tidak ada perubahan yang terjadi ditahun 2025

Aset tetap	15.794.310.929,00	16.272.285.548,00
1. Tanah	240.954.000,00	240.954.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan 31 des 2024 dan 31 des 2025 dan tidak ada perubahan.

2. Peralatan dan mesin	4.922.466.881,00	4.919.266.881,00
Merupakan nilai peralatan dan mesin yang dikuasai oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2024 dan 2025 terdapat penambahan nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 3.200.000,- berupa pembelian printer		
3. Gedung dan bangunan	19.290.497.278,00	19.290.497.278,00
Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dikuasai oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2024 dan 2025 yang tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan		
4. Jaringan Irigasi dan Jaringan	93.185.700,00	93.185.700,00
Jumlah tersebut merupakan nilai Jaringan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki dan dikuasai oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan 31 desember 2025 yang tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan		
5. Aset tetap lainnya	73.813.500,00	73.813.500,00
Tidak terdapat penambahan aktiva lancar selama tahun 2025 dan merupakan saldo per tanggal 31 Des 2024 dan 31 Des 2025 sebesar Rp. 73.813.500,-		
6. Konstruksi dalam pengerjaan	59.330.488	59.330.488,00
- Jumlah tersebut merupakan nilai Kontruksi Dalam Pekerjaan yang ada di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2024 dan 2025 yang tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan		
7. Akumulasi penyusutan asset per 31 Desember 2025 adalah sebesar	(8.885.936.918,00)	(8.404.762.299,00)
Penyusutan aset tetap sebesar Rp. 8.885.936.918,- yang terdiri dari :		
Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	(4.912.796.781,00)	
Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	(3.901.714.067,00)	
Akumulasi penyusutan Jalan,Irigasi dab Jaringan	(56.076.070)	
Akumulasi penyusutan Aset Teap Lainnya	(15.350.000)	
JUMLAH	(8.885.936.918,00)	
Aset lainnya	-	-
1. Aset lain - lain	17.300.000,00	17.300.000,00
Jumlah tersebut merupakan saldo per tanggal 31 Des 2025		
2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-17.300.000,00	-17.300.000,00
Jumlah tersebut merupakan saldo per tanggal 31 Des 2025		
KEWAJIBAN	-	-
Jumlah tersebut merupakan saldo per tanggal 31 Des 2025 merupakan Kewajiban jangka pendek		
EKUITAS		
Ekuitas	16.078.051.403,00	16.514.744.722,00
Jumlah tersebut merupakan nilai ekuitas pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah per 31 Desember 2025		

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)
5.3.1 PENDAPATAN		112.302.000,00	7.455.100,00
	Pendapatan yang diterima oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 76.732.000,- yang mana merupakan pendapatan dari Retribusi pelayanan Pasar yaitu Retribusi kios	112.302.000,00	7.455.100,00
	Terdapat Rp. 35.570.000 Piutang Retribusi Kios LO karena si wajib retribusi tidak menyetor setoran sesuai SKRD		
	Hibah yang diterima oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,-	0,00	0,00
5.3.2 BEBAN		5.373.797.047,00	5.596.928.184,00
BEBAN PEGAWAI-LO		4.243.950.429,00	3.991.808.039,00
Beban gaji dan tunjangan ASN-LO		2.936.558.570,00	2.709.315.425,00
	Gaji Pokok ASN-LO	2.098.957.396,00	1.998.589.008,00
	Tunjangan Keluarga ASN-LO	187.504.368,00	178.455.034,00
	Tunjangan Jabatan ASN-LO	114.730.000,00	154.870.000,00
	Tunjangan Fungsional ASN-LO	273.490.000,00	134.809.700,00
	Tunjangan Fungsional Umum ASN-LO	11.260.000,00	29.205.000,00
	Tunjangan Beras ASN-LO	112.908.815,00	110.440.500,00
	Tunjangan PPh/ Tunjangan khusus ASN-LO	27.952.474,00	23.627.750,00
	Pembulatan Gaji ASN-LO	35.022,00	31.974,00
	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	92.361.256,00	62.850.448,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan ASN-LO	4.339.790,00	4.712.154,00
	Iuran Jaminan Kematian ASN-LO	13.019.449,00	11.723.857,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO		1.307.391.859,00	1.259.832.614,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-LO	1.304.391.859,00	1.259.832.614,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-LO		0,00	0,00
	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Pelayanan Pasar –LO	0	-
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO		3.000.000,00	22.660.000,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pe	3.000.000,00	0,00
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	-	22.660.000,00
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	-	-
UANG LEMBUR-LO		0,00	0,00
	Uang Lembur PNS-LO	-	-
	Uang Lembur Non PNS-LO	-	-
BEBAN BARANG DAN JASA-LO			
BEBAN PERSEDIAAN-LO		123.186.162,00	468.991.054,00
Beban Bahan Pakai Habis-LO		123.186.162,00	468.991.054,00
	1 Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	33.535.472,00	14.242.000,00
	2 Beban Bahan-Bahan Lainnya	19.158.000,00	375.000,00
	3 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.858.200,00	25.416.350,00
	4 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.284.490,00	14.189.692,00
	5 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	700.000,00	1.080.000,00
	6 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	1.003.000,00
	7 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	-	-
	8 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		2.591.576,00
	8 Beban Makanan dan Minuman Rapat	8.510.000,00	4.187.500,00
	9 Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.740.000,00	5.150.000,00
	10 Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.400.000,00	2.100.000,00
	11 Beban hibah (persediaan pembangunan pasar)	-	398.655.936,00

BEBAN JASA-LO	360.424.661,00	430.187.122,00
Beban Jasa Kantor-LO	304.521.200,00	343.690.782,00
1 Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	17.225.000,00
2 Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0,00	60.000.000,00
3 Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	-
4 Beban Jasa Tenaga Administrasi	187.000.000,00	139.000.000,00
5 Beban Jasa Tenaga Kebersihan	-	12.000.000,00
6 Beban Jasa Tenaga Keamanan	-	39.000.000,00
7 Beban Jasa Kalibrasi	-	-
8 Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	-	-
9 Beban tagihan telepon	-	-
10 Beban tagihan air	333.800,00	401.375,00
11 Beban tagihan listrik	82.250.000,00	68.997.307,00
12 Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-
13 Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	6.681.100,00
14 Beban Paket/Pengiriman	60.500,00	386.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.926.900,00	-
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	22.950.000,00	-
15 Beban Registrasi/Keanggotaan	-	-
16 Beban lembur	-	-
17 Beban jasa pengganti transportasi	-	-
18 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-
19 Beban Makanan dan Minuman Rapat	-	-
20 Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	-
Beban Iuran Jaminan/Asuransi-LO	2.483.461,00	680.400,00
1 Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-
2 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.483.461,00	680.400,00
3 Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	-	-
Beban Sewa Peralatan dan Mesin-LO	2.700.000,00	2.200.000,00
1 Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.200.000,00	-
2 Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	1.000.000,00
3 Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	1.200.000,00
4 Beban Sewa Peralatan Umum	1.500.000,00	-
Beban Sewa Gedung dan Bangunan-LO	0,00	0,00
1 Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-LO	-	-
1 Beban Sewa Alat Musik	-	-
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi-LO	0,00	0,00
1 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	-	-
2 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	-	-
3 Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	-	-
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-LO	50.720.000,00	83.615.940,00
1 Beban Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	80.015.940,00
2 Beban Sosialisasi	0,00	3.600.000,00
3 Beban Bimbingan Teknis	50.720.000,00	-
4 Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	-

BEBAN PEMELIHARAAN-LO	101.064.510,00	98.709.850,00
1 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	68.199.510,00	61.379.950,00
2 Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.400.000,00	20.789.900,00
3 Beban Jasa Servis	-	-
4 Beban Belanja Penggantian suku cadang	-	-
5 Beban Belanja Bahan Bakar/Minyak Pelumas	-	-
6 Beban Belanja Jasa KIR	-	-
7 Beban belanja Pajak Kendaraan Bermotor	-	-
8 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.320.000,00	-
9 Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.045.000,00	3.660.000,00
10 Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.030.000,00	8.760.000,00
11 Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.070.000,00	4.120.000,00
12 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	-
BEBAN PERJALANAN DINAS-LO	63.996.666,00	101.577.450,00
1 Beban Perjalanan Dinas Biasa	29.361.666,00	73.532.450,00
2 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.635.000,00	28.045.000,00
BEBAN HIBAH-LO	0,00	0,00
1 Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	0,00
2 Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00
BEBAN BANTUAN SOSIAL-LO	0,00	0,00
Beban belanja bantuan sosial barang yang diserahkan-LO	0,00	-
BEBAN PENYUSUTAN-LO	481.174.619,00	505.654.669,00
Beban penyusutan Peralatan dan Mesin	110.683.660,00	135.163.710,00
Beban penyusutan Gedung dan Bangunan	362.430.692,00	362.430.692,00
Beban Penyusutan JII	8.060.267,00	8.060.267,00
Beban Penyusutan ATL	-	-
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	-	0,00
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	-	-
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	-	-
BEBAN LAIN - LAIN	-	-
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	-	-
Aset ekstracomtable	-	-
Penurunan nilai investasi	-	-
JUMLAH BEBAN	5.373.797.047,00	5.596.928.184,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.261.495.047,00)	(5.589.473.084,00)

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)
1	Ekuitas Awal	16.514.744.722,00	17.309.495.663,00
	Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2025 yang terdiri dari :		
1	Jumlah Asset lancar	242.459.174,00	
2	Jumlah Investasi Jangka Panjang	0,00	
3	Jumlah Asset Tetap	16.272.285.548,00	
4	Jumlah Asset Lainnya	0,00	
5	Jumlah Kewajiban	-	
	Jumlah Ekuitas	16.514.744.722,00	
2	Surplus/Defisit-LO	(5.261.495.047,00)	(5.589.473.084,00)
	Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 5.261.495.047,-		
3	R/K PPKD	4.824.801.728,00	4.701.208.829,00
	Selisih antara R/K (M) yaitu pendapatan sebesar Rp. 76.732.000,- dan R/K (K) sebesar Rp. 4.901.533.728,- sehingga jumlah R/K PPKD menjadi Rp. 4.824.801.728,-		
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / kesalahan Mendasar	-	93.513.314,00
-	Koreksi selisih revaluasi aset tetap	0,00	93.513.314,00
	lain- lain		93.513.314,00
-	Koreksi Hutang Tahun Lalu	-	-
	merupakan jumlah koreksi hutang tahun lalu sampai dengan 31 Desember 2025 adalah Tunda Bayar Pagar Gedung PLUT sebesar Rp. 0,-		
-	Mutasi Tambah KDP	-	-
	Merupakan jumlah penambahan Kontruksi Dalam Pembangunan sebesar Rp. 59.330.488,-		
-	Mutasi Kurang Aset Tetap	0,00	0,00
	Merupakan jumlah pengurangan aset tetap sebesar Rp. 0,-		
-	Koreksi Kas di Bendahara Penerima Tahun Lalu	0,00	0,00
	Merupakan nilai koreksi kas di bendahara penerima sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,-		
-	Koreksi nilai Investasi	0,00	0,00
	Merupakan nilai koreksi investasi sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,-		
-	Koreksi penyisihan piutang	-	0,00
	merupakan penyisihan bunga dan denda dana bergulir APBD Kabupaten per 31 Des 2025 sebesar Rp.0,-		
-	Koreksi Akumulasi Peny. Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun sebelumnya	-	-
	merupakan penyusutan aset gedung dan bangunan		
-	Koreksi Akumulasi Peny. Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun sebelumnya	-	-
	merupakan penyusutan aset peralatan dan mesin		
-	Mutasi / Koreksi Aset Extra Comp.	-	-
	merupakan aset yang tidak di kapitalisasi sebesar Rp. 0,-		
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	30	

- **Penghapusan**

merupakan penghapusan aset sebesar Rp. 0,-

5 Ekuitas Akhir		16.078.051.403,00	16.514.744.722,00
Ekuitas akhir merupakan kekayaan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 16.078.051.403,00 yang			
1 Jumlah Asset lancar	283.740.474,00		
2 Jumlah Investasi Jangka Panjang	-		
3 Jumlah Asset Tetap	15.794.310.929,00		
4 Jumlah Asset Lainnya	-		
5 Jumlah Kewajiban	-		
Jumlah Ekuitas	16.078.051.403,00		

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Struktur Organisasi

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Lima Puluh Kota dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi secara keseluruhan.

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan tersebut, di Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota ditempatkan pejabat Esselon II b, pejabat Esselon III a, pejabat Esselon III b dan Esselon IV. Adapun uraian masing-masing Esselon adalah sebagai berikut:

1. Esselon II : Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Esselon III : Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang
3. Esselon IV : Sub bagian Umum dan kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi dapat membantu kelancaran dari pelaksanaan penganggaran dengan baik. Struktur organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota dikepalai oleh Kepala Dinas dibantu oleh sekretaris dan membawahi 3 (tiga) sub bagian dan 4 (empat) bidang dengan uraian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub – Substansi Perencanaan dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Fasilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan
4. Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan
 - a. 2 (dua) orang Kelompok Jabatan Fungsional
5. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
 - a. 2 (dua) orang Kelompok Jabatan Fungsional

6. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

a. 1 (satu) orang Kelompok Jabatan Fungsional

Penjabaran tugas di lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

6.2 Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan di Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun anggaran 2025 dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.

BAB VII

PENUTUP

7.1 KESIMPULAN

Secara keseluruhan kegiatan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jumlah anggaran sebesar Rp. 5.023.233.195,-, sedangkan realisasi mencapai Rp. 4.901.533.728,- dan Uang Yang Harus Disetor (UYHD) sebesar Rp 1.334.168,- yang telah disetor ke kas daerah pada tanggal 30 Desember 2025 dengan seluruh pembayaran dilakukan dengan sistem non tunai.

7.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan untuk tahun berikutnya dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan atau belanja daerah, sehingga mengurangi dana yang harus di setor ke kas daerah.

Demikianlah Laporan Keuangan Tahun 2025 ini disampaikan, kiranya dapat berguna dan bermamfaat dalam pengambilan kebijakan tahun berikutnya dan terima kasih.

Sarilamak, 30 Januari 2026
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi
Dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Lima Puluh Kota



ENDRA AMZAR, SH
NIP. 196809061996031001